

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGATASI KEMISKINAN
MELALUI BANTUAN SOSIAL DI KECAMATAN SAKO KOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

M. Reyhan Akbar Mahasatya

NPP. 32.0222

Asdaf Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: 32.0222@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Adfin Rochmad Baidhowah, S.IP., M.PA.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Poverty is a multidimensional problem that is still a significant challenge in Indonesia, including in South Sumatra Province, especially in Sako District, Palembang City. The government has implemented various social assistance programs such as Non-Cash Food Assistance (BPNT) and Direct Cash Assistance (BLT) as an effort to reduce poverty rates. However, the inaccuracy of the target and the low proportion of social assistance recipients to the number of poor people are the main challenges in the effectiveness of the program. **Purpose:** This study aims to analyze the application of collaborative governance in overcoming poverty through social assistance programs in Sako District. **Method:** The research approach used is qualitative descriptive with the collaborative governance model of Ansell and Gash (2008), which includes four dimensions: initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative processes. **Result:** The results of the study show that the collaboration between the local government, the Social Service, the distributors, and the beneficiary community is not optimal. Despite the increase in the number of aid recipients from year to year, there are still many poor people who do not receive assistance. Some of the inhibiting factors include the mismatch of recipient data, low transparency in data collection, and the lack of maximum involvement of local stakeholders. As a form of improvement, periodic data verification and validation are carried out, as well as the rearrangement of the mechanism for distributing social assistance in accordance with the latest regulations such as the Regulation of the Minister of Social Affairs Number 150 of 2022. **Conclusion:** This study recommends the importance of strengthening collaboration between institutions and communities as well as increasing institutional capacity in the management of social assistance to achieve more effective and targeted poverty reduction in Sako District.

Keywords: poverty, social assistance, collaborative governance, Sako District, Palembang City

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang masih menjadi tantangan signifikan di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Kecamatan Sako, Kota Palembang. Pemerintah telah melaksanakan berbagai program bantuan sosial seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan. Namun, ketidaktepatan sasaran dan rendahnya proporsi penerima bantuan sosial terhadap jumlah penduduk miskin menjadi tantangan utama dalam efektivitas program tersebut. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *collaborative governance* dalam mengatasi kemiskinan melalui program bantuan sosial di Kecamatan Sako. **Metode:**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan model *collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2008), yang mencakup empat dimensi: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, Dinas Sosial, pihak penyalur, dan masyarakat penerima manfaat belum optimal. Meskipun terdapat peningkatan jumlah penerima bantuan dari tahun ke tahun, masih banyak penduduk miskin yang tidak mendapatkan bantuan. Beberapa faktor penghambat antara lain ketidaksesuaian data penerima, rendahnya transparansi dalam pendataan, dan belum maksimalnya pelibatan pemangku kepentingan lokal. Sebagai bentuk perbaikan, dilakukan verifikasi dan validasi data secara berkala, serta penyusunan ulang mekanisme penyaluran bantuan sosial sesuai dengan regulasi terbaru seperti Peraturan Menteri Sosial Nomor 150 Tahun 2022. **Kesimpulan:** Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan kolaborasi antar lembaga dan masyarakat serta peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan bantuan sosial untuk mencapai pengurangan kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran di Kecamatan Sako.

Kata kunci: kemiskinan, bantuan sosial, *collaborative governance*, Kecamatan Sako, Kota Palembang

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi persoalan utama di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), jumlah penduduk miskin nasional mencapai 25,22 juta jiwa atau 9,03% dari total penduduk. Kondisi ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan dampak pandemi *COVID-19* yang menyebabkan peningkatan angka kemiskinan di berbagai daerah, termasuk Kota Palembang. Salah satu penyebab utama kemiskinan ialah ketimpangan distribusi pendapatan dan rendahnya akses terhadap sumber daya (Kuncoro & Handayani, 2015).

Di Kota Palembang, Kecamatan Sako menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Tahun 2023, tercatat 2.351 penduduk tergolong miskin, namun hanya 498 orang atau 21,1% yang menerima bantuan sosial (BPS, 2024). Ketidaksesuaian jumlah penerima dengan total penduduk miskin menunjukkan adanya ketimpangan dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Salah satu penyebabnya ialah perubahan mekanisme pendataan serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan.

Pemerintah telah meluncurkan berbagai program bantuan sosial seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin (Hutagalung dkk., 2022; Akib & Risfaisal, 2016). Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaktepatan sasaran dan kurangnya transparansi. Hal ini sejalan dengan pandangan Hamdi (2014) yang menyatakan bahwa kebijakan publik sering kali mengalami distorsi dalam tahap implementasi, terutama ketika proses partisipatif dan kontrol sosial tidak berjalan optimal. Hal ini mengakibatkan bantuan tidak sepenuhnya menasar kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Dalam konteks inilah pendekatan *collaborative governance* menjadi penting. Konsep ini mengedepankan kerja sama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan publik secara efektif (Ansell & Gash, 2008). Melalui kolaborasi yang sinergis, program bantuan sosial dapat didesain dan dijalankan secara lebih inklusif, tepat sasaran, dan efisien.

Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi *collaborative governance* dalam penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Sako. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis sejauh mana kolaborasi antar pemangku kepentingan

mampu mengatasi permasalahan kemiskinan dan meningkatkan efektivitas program sosial di wilayah tersebut.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kemiskinan tetap menjadi persoalan struktural yang belum terselesaikan secara tuntas di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Palembang. Berbagai program bantuan sosial telah diluncurkan oleh pemerintah, baik berupa bantuan pangan non tunai maupun bantuan langsung tunai. Program-program ini ditujukan untuk membantu masyarakat miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan memperbaiki taraf hidup. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, efektivitas program bantuan sosial masih menghadapi tantangan yang serius, seperti ketidaktepatan sasaran, ketidaksesuaian data penerima, hingga lemahnya pelibatan pemangku kepentingan di tingkat lokal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi *collaborative governance* dalam mengatasi kemiskinan melalui bantuan sosial di Kecamatan Sako Kota Palembang. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan kolaborasi tersebut, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Penelitian ini lahir dari kenyataan bahwa meskipun jumlah penerima bantuan sosial mengalami peningkatan setiap tahunnya, masih terdapat kesenjangan besar antara jumlah penduduk miskin dan mereka yang benar-benar menerima manfaat bantuan. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan struktural dan kelembagaan yang perlu ditelaah lebih dalam.

Kesenjangan penelitian atau *research gap* yang ingin dijawab dalam studi ini adalah belum banyaknya kajian yang secara khusus menelusuri peran *collaborative governance* dalam konteks penanggulangan kemiskinan melalui program bantuan sosial pada tingkat kecamatan di wilayah perkotaan. Sebagian besar penelitian terdahulu masih bersifat umum, terbatas pada evaluasi teknis distribusi bantuan atau kajian kebijakan makro, tanpa mengulas secara detail bagaimana kolaborasi antar aktor lokal seperti pemerintah daerah, dinas sosial, lembaga penyalur, dan masyarakat penerima manfaat dijalankan dalam praktiknya.

Lebih lanjut, penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Handayani dkk. (2023), Yuliana (2023), dan Fatimatuzzuhro (2022) memang telah membahas bentuk kolaborasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan, namun masing-masing masih memiliki keterbatasan pada aspek konteks geografis, variabel analisis, dan cakupan kebijakan. Misalnya, sebagian besar tidak menyoroti dampak perubahan regulasi terhadap akurasi data penerima bantuan sosial atau bagaimana proses verifikasi dan validasi data mempengaruhi efektivitas penyaluran bantuan. Padahal, dinamika tersebut menjadi sangat penting untuk dipahami, terutama sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 150 Tahun 2022 tentang Tata Cara Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan yang lebih kontekstual, yaitu melalui studi kasus di Kecamatan Sako Kota Palembang. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kolaborasi antar pihak, tetapi juga untuk memberikan gambaran mengenai tantangan nyata dan solusi yang dapat diupayakan agar penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan berdaya guna dalam upaya pengentasan kemiskinan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas tentang implementasi *collaborative governance* dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Penelitian oleh Handayani dkk. (2023) di Kabupaten Bangkalan menekankan pentingnya adanya kesepahaman antara pemerintah pusat dan daerah dalam menetapkan data kemiskinan serta perlunya sinkronisasi informasi secara berkala. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menyoroti kolaborasi

dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), namun belum membahas secara mendalam dinamika kolaborasi di tingkat akar rumput atau kecamatan.

Penelitian lain oleh Jaya dkk. (2023) di Kabupaten Musi Rawas menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan diarahkan pada kebijakan tingkat *mikro* dan *makro* yang bertujuan mengurangi beban ekonomi masyarakat. Fokus utamanya adalah pada strategi nasional pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Meskipun menggunakan pendekatan yang sama yaitu *kualitatif* dan membahas kolaborasi, studi ini tidak secara spesifik menelaah keterlibatan masyarakat penerima manfaat maupun implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Yuliana (2023) melalui penelitiannya di Kota Makassar menekankan bahwa keberhasilan *collaborative governance* sangat bergantung pada identifikasi kebutuhan *stakeholder* serta hambatan yang dihadapi. Penelitian ini juga mengaitkan kebijakan kolaboratif dengan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* 2030. Sementara itu, Fatimatuzzuhro (2022) meneliti pelaksanaan *collaborative governance* dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Magelang dan menyimpulkan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan cukup berjalan baik, namun masih terdapat kendala dalam komunikasi antara instansi pelaksana dan legislatif terkait sumber pendanaan.

Penelitian kelima dilakukan oleh Fadilah (2021), yang menelaah implementasi bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai di Desa Mompang Julu. Ia menemukan bahwa distribusi bantuan masih menghadapi persoalan transparansi dan pemotongan dana oleh pelaksana. Berbeda dengan penelitian lainnya, kajian ini menggunakan pendekatan *fiqih siyasah* untuk menilai keadilan dalam distribusi bantuan, yang tentu menjadi perspektif menarik namun terbatas dalam menjelaskan praktik kolaboratif antar pemangku kepentingan.

Secara umum, kelima penelitian terdahulu menunjukkan adanya kesamaan fokus dalam membahas kolaborasi dalam program pengentasan kemiskinan, namun masing-masing memiliki keterbatasan dari segi konteks wilayah, aktor yang dilibatkan, serta fokus program. Tidak banyak yang secara khusus membahas penerapan *collaborative governance* pada skala lokal kecamatan dengan keterlibatan aktif pemerintah daerah, dinas sosial, dan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi *research gap* tersebut melalui studi kasus di Kecamatan Sako Kota Palembang.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki nilai kebaruan ilmiah karena mengkaji implementasi *collaborative governance* dalam pengentasan kemiskinan melalui program bantuan sosial di tingkat kecamatan, khususnya di Kecamatan Sako, Kota Palembang. Pendekatan ini masih jarang dikaji secara mendalam pada level administratif paling dekat dengan masyarakat, padahal kompleksitas masalah kemiskinan sering kali lebih nyata di tingkat lokal. Kebaruan ini semakin kuat karena penelitian menggunakan teori *collaborative governance* dari Ansell & Gash (2008) yang menekankan empat dimensi utama: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Dengan menggunakan teori tersebut, penelitian ini mampu memetakan secara sistematis bagaimana aktor-aktor lokal berinteraksi, bernegosiasi, dan membangun kepercayaan untuk mencapai tujuan bersama dalam konteks distribusi bantuan sosial.

Perbedaan mendasar penelitian ini dibandingkan dengan studi sebelumnya, seperti oleh Handayani dkk. (2023), adalah pada fokus wilayah. Penelitian Handayani menekankan kolaborasi di tingkat kabupaten, sedangkan penelitian ini secara eksplisit meneliti praktik kolaborasi pada tingkat kecamatan sebagai unit birokrasi terdekat dengan masyarakat. Sementara itu, penelitian Yuliana (2023) mengaitkan *collaborative governance* dengan pencapaian SDGs, tanpa menyoroti mekanisme bantuan sosial secara spesifik. Penelitian Fatimatuzzuhro (2022) memang membahas kolaborasi dalam Program Keluarga Harapan

(PKH), tetapi lebih menyoroti peran forum koordinasi internal antarinstansi tanpa menggambarkan kesenjangan data dan partisipasi masyarakat penerima manfaat secara langsung.

Selain itu, penelitian ini turut memperhatikan aspek perubahan regulasi terbaru, seperti Peraturan Menteri Sosial Nomor 150 Tahun 2022 tentang verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial, sebagai latar belakang penting dalam menilai efektivitas implementasi program bantuan sosial. Hal ini memberikan kontribusi baru dalam menjelaskan keterkaitan antara dinamika kebijakan, kesenjangan data penerima bantuan, dan praktik kolaboratif di lapangan, yang belum menjadi fokus utama dalam studi terdahulu.

Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan pendekatan yang lebih kontekstual dan aplikatif dalam memahami kompleksitas kolaborasi multi-aktor di tingkat lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai *collaborative governance* serta memberikan masukan empiris bagi pemerintah daerah dalam memperkuat praktik kolaboratif yang lebih efektif, inklusif, dan responsif dalam menanggulangi kemiskinan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *collaborative governance* dalam mengatasi kemiskinan melalui program bantuan sosial di Kecamatan Sako Kota Palembang, dengan fokus pada bagaimana kolaborasi antara pemerintah, dinas sosial, lembaga penyalur, dan masyarakat penerima manfaat dijalankan guna meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode ini dianggap sesuai karena menurut Sugiyono (2019), pendekatan kualitatif cocok digunakan untuk memahami realitas sosial secara mendalam, terutama dalam konteks interaksi antaraktor dalam kebijakan publik. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, khususnya dalam mengkaji proses dan dinamika implementasi *collaborative governance* dalam penyaluran bantuan sosial di tingkat lokal. Penelitian kualitatif memberikan ruang untuk menggambarkan realitas yang kompleks, tidak terukur secara statistik, serta mengungkap makna di balik interaksi sosial antar aktor dalam kebijakan pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sako, Kota Palembang, yang dipilih karena wilayah ini memiliki jumlah penduduk miskin yang tinggi dan menjadi salah satu penerima bantuan sosial terbesar di provinsi Sumatera Selatan. Informan kunci dalam penelitian ini terdiri dari perwakilan Dinas Sosial Kota Palembang, aparatur pemerintah Kecamatan Sako, pendamping program bantuan sosial, serta masyarakat penerima manfaat. Pemilihan informan ini dilakukan secara *purposive* dengan pertimbangan bahwa mereka adalah pihak yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan program bantuan sosial dan memiliki pengetahuan serta pengalaman yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Nurdin & Hartati (2018) menekankan bahwa triangulasi metode seperti ini penting untuk meningkatkan kredibilitas data dalam penelitian sosial. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan Simangunsong (2019) yang menekankan bahwa dalam penelitian pemerintahan, metode kualitatif interaktif penting digunakan untuk menangkap dinamika sosial-politik yang tidak dapat diungkap melalui angka semata. Untuk menjaga validitas temuan, digunakan teknik *triangulasi* sumber dan metode. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 25 Januari 2025 di Kecamatan Sako, sebagai upaya memperoleh informasi

yang aktual, mendalam, dan kontekstual dalam menggambarkan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan melalui bantuan sosial.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan mencakup seluruh data serta informasi yang diperoleh peneliti selama proses penelitian yang berfokus pada lokus permasalahan. Temuan tersebut kemudian diselaraskan dengan teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam memahami masalah yang ada. Pembahasan mengenai Pengatasan masalah kemiskinan kelalui bantuan sosial di Kecamatan Sako Kota Palembang dijelaskan secara rinci dalam subbab berikut.

3.1. *Collaborative Governance* dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Bantuan Sosial di Kecamatan Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi *collaborative governance* dalam penanggulangan kemiskinan melalui program bantuan sosial di Kecamatan Sako, Kota Palembang. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teori *collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2008), yang mencakup empat dimensi utama: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Melalui teknik analisis interaktif model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

a. Kondisi Awal

Dimensi kondisi awal merupakan fondasi penting dalam implementasi *collaborative governance*, karena mencerminkan kesiapan lingkungan sosial, politik, dan kelembagaan sebelum kolaborasi dimulai. Dalam konteks pelaksanaan bantuan sosial di Kecamatan Sako Kota Palembang, kondisi awal menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat kerangka regulatif dan aktor-aktor yang berperan aktif, masih ditemukan berbagai tantangan struktural dan relasional yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial dalam mengatasi kemiskinan.

Ketidakseimbangan antara pihak yang berkolaborasi menjadi hambatan utama dalam proses pelaksanaan bantuan sosial. Pemerintah memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal, baik dari sisi sumber daya, kewenangan, maupun akses terhadap informasi. Ketimpangan ini menciptakan dominasi pemerintah dalam pengambilan keputusan, yang berdampak pada kurang optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Meskipun Kepala Dinas Sosial Kota Palembang dan Camat Sako menyatakan bahwa kolaborasi telah dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk bank penyalur dan organisasi sosial, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa distribusi bantuan masih menghadapi kendala dalam akurasi data dan efektivitas pengawasan.

Kehadiran insentif yang jelas bagi para pemangku kepentingan menjadi elemen penting yang turut mempengaruhi keberhasilan kolaborasi. Pemerintah mendapatkan insentif melalui capaian target pengentasan kemiskinan, sedangkan LSM dan komunitas lokal memperoleh manfaat dalam bentuk penguatan posisi sosial dan akses terhadap program-program bantuan. Namun, jika insentif tersebut tidak proporsional dengan beban kerja yang ditanggung, maka dapat menimbulkan penurunan komitmen. Berdasarkan wawancara, insentif dalam bentuk dukungan fasilitas dan pengakuan peran telah diberikan, namun belum seluruh pihak merasakan manfaat yang setara.

Riwayat atau kekhawatiran terhadap konflik antar pemangku kepentingan juga menjadi bagian dari kondisi awal yang memerlukan perhatian. Konflik sering kali timbul akibat perbedaan kepentingan, peran yang tumpang tindih, serta ketidaksesuaian antara kebijakan dan realitas di lapangan. Pemerintah, LSM, dan masyarakat memiliki persepsi

serta harapan berbeda terhadap program bantuan sosial. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa pemerintah telah membangun sistem pengawasan melalui kerja sama dengan tenaga kesejahteraan masyarakat dan menyediakan mekanisme pengaduan, guna mencegah dan mengelola konflik yang berpotensi muncul selama proses distribusi bantuan.

Berdasarkan pembahasan ketiga indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi awal pelaksanaan *collaborative governance* dalam bantuan sosial di Kecamatan Sako belum sepenuhnya ideal. Ketimpangan peran, distribusi insentif yang belum merata, dan potensi konflik yang belum sepenuhnya terkelola menjadi tantangan utama. Meskipun terdapat komitmen kolaboratif dari pemerintah dan pemangku kepentingan lain, diperlukan penguatan struktur kolaborasi sejak awal agar proses pelaksanaan program berjalan lebih adil, efisien, dan berkelanjutan.

b. Desain Kelembagaan

Dimensi desain kelembagaan merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan *collaborative governance* karena mencakup struktur organisasi, pembagian peran, mekanisme komunikasi, serta kerangka regulasi yang mendasari interaksi antar pemangku kepentingan. Dalam konteks bantuan sosial di Kecamatan Sako, efektivitas desain kelembagaan menjadi penentu dalam kelancaran program, mulai dari pendataan hingga distribusi. Kelembagaan yang tidak dirancang secara efisien dan transparan dapat memunculkan tumpang tindih wewenang dan lemahnya koordinasi, sehingga bantuan berisiko tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, pemetaan terhadap aspek partisipasi, forum komunikasi, regulasi dasar, dan transparansi menjadi penting dalam menilai seberapa kuat fondasi kelembagaan yang menopang kolaborasi dalam bantuan sosial. Menurut Hamid (2018), kelembagaan yang kuat harus mampu menyediakan mekanisme formal yang mendukung koordinasi lintas sektor dan menjamin akuntabilitas program publik.

Partisipasi menjadi pilar awal dalam desain kelembagaan yang berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan (baik pemerintah, LSM, komunitas lokal, maupun sektor swasta) memiliki peran yang proporsional dan terlibat secara aktif dalam seluruh tahapan program. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Tenaga Kesejahteraan Masyarakat (TKM), partisipasi diwujudkan melalui pendampingan masyarakat penerima manfaat, verifikasi data, serta edukasi. Namun, di lapangan, partisipasi masyarakat masih terbatas pada tahapan pelaksanaan dan belum kuat dalam proses perencanaan maupun pengawasan. Keterbatasan ini mengindikasikan bahwa mekanisme partisipatif belum sepenuhnya inklusif dan perlu diperkuat agar lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

Forum komunikasi berperan sebagai jembatan koordinasi antar pihak yang terlibat dalam bantuan sosial. Di Kecamatan Sako, forum ini berbentuk rapat koordinasi dan komunikasi informal yang dilakukan antara kelurahan, Dinas Sosial, RT/RW, dan lembaga sosial. Wawancara dengan Ketua RT menunjukkan bahwa komunikasi untuk validasi data dan pemantauan warga berjalan cukup aktif. Namun demikian, tantangan muncul karena belum adanya forum formal yang bersifat reguler, serta belum optimalnya pelibatan kelompok rentan dalam diskusi. Hal ini dapat menghambat terbangunnya kesepakatan bersama dan mereduksi efektivitas distribusi bantuan.

Kolaborasi dengan peraturan dasar yang jelas menjadi syarat mutlak agar kerja sama antar pemangku kepentingan memiliki arah dan legitimasi. Di Kota Palembang, Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2021 menjadi dasar hukum utama dalam pelaksanaan bantuan sosial. Regulasi ini mengatur secara rinci mengenai penganggaran, pelaksanaan, hingga monitoring bantuan. Meskipun regulasi telah tersedia, kendala masih ditemukan dalam implementasinya, seperti lemahnya pemahaman pelaksana

lapangan dan kurangnya pengawasan terhadap kepatuhan regulasi. Ini menunjukkan pentingnya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan bagi seluruh aktor.

Transparansi dalam penyelenggaraan kolaborasi merupakan aspek yang sangat menentukan dalam membangun kepercayaan masyarakat. Pemerintah Kota Palembang telah mulai menerapkan sistem informasi digital dan menyampaikan informasi melalui media seperti papan pengumuman serta koordinasi dengan RT/RW. Wawancara dengan Kepala Dinas Sosial dan Sekretaris Kecamatan menunjukkan komitmen untuk meningkatkan keterbukaan data penerima dan proses distribusi. Namun, hambatan seperti keterbatasan teknologi dan kurangnya literasi digital masyarakat masih menghalangi transparansi berjalan secara maksimal.

Secara keseluruhan, desain kelembagaan dalam pelaksanaan bantuan sosial di Kecamatan Sako telah memiliki fondasi yang cukup kuat melalui adanya regulasi, forum komunikasi, dan partisipasi berbagai pihak. Namun, efektivitasnya masih terganjal oleh persoalan teknis dan struktural seperti partisipasi terbatas, kurangnya kesinambungan forum, belum meratanya pemahaman regulasi, serta tantangan dalam mewujudkan transparansi. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sistem kelembagaan secara holistik agar pelaksanaan *collaborative governance* dalam bantuan sosial dapat berjalan lebih efektif dan berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan.

c. Kepemimpinan Fasilitatif

Dimensi kepemimpinan fasilitatif merupakan komponen kunci dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan *collaborative governance*, terutama dalam program bantuan sosial yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan berbeda. Di Kecamatan Sako, kepemimpinan fasilitatif berperan sebagai penghubung antar-pemangku kepentingan, menjembatani koordinasi, serta menciptakan suasana kolaboratif yang kondusif. Pemimpin yang efektif tidak hanya mengambil keputusan, tetapi juga memfasilitasi komunikasi, mengelola sumber daya secara efisien, dan menciptakan ruang partisipatif dalam proses distribusi bantuan sosial.

Proses kolaborasi yang termanajemen dengan cukup terlihat dari adanya upaya perencanaan dan koordinasi antara pemerintah, Dinas Sosial, TKM, dan organisasi sosial dalam pendataan serta pengawasan bantuan. Pernyataan Camat Sako menunjukkan bahwa sinergi telah dilakukan melalui kerja sama lintas sektor. Namun, masih terdapat tantangan berupa ketidakteraturan komunikasi, ketimpangan peran dalam pengambilan keputusan, dan terbatasnya monitoring yang menyeluruh. Kondisi ini menandakan perlunya pemimpin yang dapat secara konsisten mengarahkan dan mengevaluasi jalannya kolaborasi agar tidak hanya formal, tetapi juga substantif dalam pencapaian tujuan.

Kemampuan dalam melaksanakan teknis yang dikelola juga menjadi penentu keberhasilan kebijakan bantuan sosial. Hal ini mencakup pendataan, verifikasi, distribusi, hingga evaluasi pelaksanaan program. Wawancara dengan petugas Dinas Sosial menunjukkan bahwa verifikasi dilakukan berdasarkan DTKS dan kunjungan lapangan. Kendati demikian, kendala seperti kurangnya tenaga profesional, terbatasnya infrastruktur, dan lemahnya pengawasan masih membatasi efektivitas teknis pelaksanaan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi teknis melalui pelatihan, digitalisasi sistem, dan integrasi lintas sektor sangat diperlukan.

Pemberdayaan terhadap kolaborasi ditunjukkan melalui pelibatan aktif RT/RW dalam pemutakhiran data serta peningkatan koordinasi lintas lembaga oleh Camat dan Dinas Sosial. Upaya ini bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat dan pelaksana program agar tidak hanya menjalankan kebijakan, tetapi juga menjadi bagian dari proses perbaikan. Namun, hambatan seperti minimnya pelatihan komunitas, kurangnya

keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, dan keterbatasan dukungan logistik menunjukkan bahwa pemberdayaan masih bersifat parsial. Strategi pemberdayaan yang sistematis diperlukan agar aktor lokal dapat berperan secara optimal dalam setiap tahapan kebijakan.

Secara keseluruhan, kepemimpinan fasilitatif dalam program bantuan sosial di Kecamatan Sako telah menunjukkan peran penting dalam menjembatani kolaborasi, mengelola teknis program, dan mendorong pemberdayaan. Namun, keberhasilan ini masih belum merata karena adanya hambatan struktural dan kapasitas sumber daya. Diperlukan kepemimpinan yang tidak hanya adaptif, tetapi juga *transformative*, yakni mampu mendorong perubahan sistemik melalui penguatan peran semua pemangku kepentingan dalam kerangka kerja yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan.

d. Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi merupakan inti dari keberhasilan pelaksanaan program bantuan sosial di Kecamatan Sako, di mana keterlibatan multi-aktor seperti pemerintah, LSM, komunitas lokal, dan sektor swasta memerlukan sinergi yang kuat dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Keberhasilan proses ini sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi, kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama, dan hasil konkret yang mampu mendorong efektivitas serta keberlanjutan program. Tantangan seperti keterbatasan koordinasi, perbedaan kepentingan, dan kurangnya sumber daya seringkali menghambat jalannya proses kolaborasi. Oleh karena itu, penguatan dimensi proses kolaboratif menjadi kunci utama dalam memperbaiki pelaksanaan bantuan sosial. Emerson *et al.* (2012) dalam kerangka kolaboratifnya menekankan bahwa proses kolaborasi yang ideal memerlukan kepercayaan, komitmen bersama, dan dialog tatap muka yang berkesinambungan antaraktor.

Dialog tatap muka menjadi sarana penting untuk membangun komunikasi yang langsung dan konstruktif antar-pemangku kepentingan. Pertemuan koordinasi, musyawarah bersama, serta diskusi publik memberikan ruang bagi penyampaian aspirasi, penyelesaian kendala, dan perumusan strategi bersama. Pernyataan Kepala Dinas Sosial menunjukkan pentingnya dialog dalam mempercepat proses distribusi dan memutakhirkan data. Meski demikian, keterbatasan partisipasi aktif dan waktu menjadi kendala, sehingga diperlukan sistem pertemuan yang lebih terstruktur dan inklusif, termasuk pemanfaatan teknologi sebagai pendukung komunikasi lintas aktor.

Membangun kepercayaan dilakukan melalui transparansi informasi, keterbukaan proses distribusi, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan. Sekretaris Camat Sako menyampaikan pentingnya publikasi data dan pelibatan RT/RW dalam proses, menunjukkan langkah konkret membangun kepercayaan. Namun, kepercayaan masih bisa terganggu oleh pengalaman negatif atau informasi yang tidak tersampaikan. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan dan komunikasi jujur menjadi langkah strategis dalam mempertahankan hubungan kolaboratif yang sehat.

Komitmen yang kuat ditunjukkan melalui upaya berkelanjutan pemerintah dan stakeholder dalam menghadapi berbagai kendala seperti verifikasi data dan keterlambatan pencairan. Kepala Dinas Sosial dan Sekretaris Camat menekankan pentingnya edukasi dan transparansi untuk menjaga akurasi dan efektivitas bantuan. Komitmen ini harus diperkuat dengan evaluasi kinerja bersama dan kesepakatan tanggung jawab yang jelas, agar kolaborasi tidak hanya berlangsung formal tetapi juga berdampak nyata.

Berbagi pemahaman terkait tantangan menciptakan kesadaran bersama atas kendala lapangan, seperti ketidaksesuaian data, pemanfaatan bantuan yang tidak tepat, dan perubahan pola pikir penerima. Tanggapan dari TKM dan Pendamping PKH

menunjukkan pentingnya diskusi terbuka untuk merumuskan solusi adaptif. Pemahaman bersama dapat membangun empati dan mengurangi potensi konflik, sekaligus meningkatkan efektivitas kolaborasi ke depan.

Hasil sementara dari kolaborasi menunjukkan peningkatan jumlah penerima bantuan di empat kelurahan, dengan respons positif dari masyarakat penerima manfaat. Namun, harapan terhadap peningkatan jumlah bantuan dan keinginan untuk adanya program pemberdayaan menjadi catatan penting bagi perbaikan kebijakan. Data dan tanggapan dari warga menunjukkan bahwa hasil kolaborasi sudah mulai terasa, namun evaluasi rutin dan peningkatan kualitas komunikasi harus terus dilakukan agar manfaat yang dirasakan semakin luas dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, dimensi proses kolaborasi dalam pelaksanaan bantuan sosial di Kecamatan Sako telah menunjukkan perkembangan positif melalui keterlibatan aktif pemangku kepentingan, dialog terbuka, serta penguatan komitmen. Meski masih dihadapkan pada sejumlah kendala, kolaborasi yang terkelola dengan baik telah memberikan dampak konkret dalam pengurangan beban ekonomi masyarakat. Ke depan, strategi peningkatan komunikasi, partisipasi, dan akuntabilitas menjadi kunci untuk memperkuat efektivitas dan keberlanjutan program bantuan sosial berbasis kolaboratif.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan *collaborative governance* dalam penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Sako belum sepenuhnya optimal, terutama dalam aspek koordinasi, partisipasi, dan validitas data penerima. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Handayani dkk. (2023) yang menyoroti lemahnya sinergi antarlembaga sebagai hambatan utama dalam program penanggulangan kemiskinan. Namun, berbeda dengan studi tersebut yang fokus pada dinamika antarinstansi pemerintah pusat dan daerah, penelitian ini menekankan pentingnya pelibatan aktor lokal seperti ketua RT/RW dan tenaga kesejahteraan masyarakat sebagai penghubung langsung antara kebijakan dan penerima manfaat. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini memperluas pendekatan *governance* sebelumnya melalui pembuktian bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh aktor akar rumput.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini memperkuat temuan Yuliana (2023) yang menunjukkan bahwa komunikasi lintas sektor yang terbuka dan responsif merupakan kunci keberhasilan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Dalam konteks Kecamatan Sako, komunikasi memang telah berjalan secara intensif melalui dialog tatap muka dan koordinasi antar pemangku kebijakan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa forum komunikasi tersebut masih bersifat informal dan belum terlembagakan secara sistematis. Berbeda dengan studi FatimatuZZuhro (2022) yang menemukan peran dominan legislatif dalam proses pengawasan program sosial di Kota Magelang, penelitian ini menunjukkan dominasi pelaksana teknis di tingkat kecamatan dan kelurahan, yang justru memperlihatkan struktur tata kelola yang lebih teknokratis dibandingkan partisipatif.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa distribusi peran dan komitmen para pemangku kepentingan di Kecamatan Sako masih belum merata, yang menyebabkan ketimpangan dalam pelaksanaan program. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Fadilah (2021) yang mengidentifikasi korupsi mikro sebagai penyebab utama ketidaktepatan sasaran bantuan sosial. Dalam penelitian ini, tidak ditemukan indikasi pemotongan bantuan oleh oknum, melainkan keterbatasan sumber daya, rendahnya kapasitas teknis, dan lambatnya pencairan dana menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, penelitian ini menolak sebagian temuan Fadilah dengan alasan karakteristik wilayah yang berbeda serta keberadaan sistem pengawasan yang relatif lebih terantau di Kecamatan Sako.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi dalam kebijakan bantuan sosial tidak hanya bergantung pada adanya regulasi atau kemauan politik

semata, melainkan sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan fasilitatif, kejelasan desain kelembagaan, dan keberfungsian forum komunikasi antar-pihak. Temuan ini memperkaya khazanah literatur tentang *collaborative governance*, khususnya pada level mikro pemerintahan kota, dengan menghadirkan bukti empiris bahwa sinergi lokal yang kuat dapat meningkatkan efektivitas program bantuan sosial dalam konteks pengentasan kemiskinan. Scott & Thomas (2017) menambahkan bahwa posisi aktor dalam jaringan kolaboratif sangat menentukan sejauh mana mereka bisa memengaruhi hasil dari proses *collaborative governance*, terutama dalam sistem kebijakan lokal.

3.3. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Salah satu temuan menarik dalam penelitian ini adalah rendahnya literasi digital dan partisipasi masyarakat dalam sistem pengawasan bantuan sosial. Meskipun pemerintah telah mulai mengembangkan sistem digitalisasi data bantuan dan membuka kanal pengaduan daring, keterbatasan akses informasi dan kemampuan masyarakat untuk menggunakan teknologi masih menjadi kendala signifikan. Hal ini berdampak pada terbatasnya pelibatan masyarakat dalam memantau distribusi bantuan serta mempersulit transparansi yang menjadi prinsip utama dalam *collaborative governance*. Kondisi ini menunjukkan bahwa infrastruktur digital dan edukasi teknologi belum menjadi perhatian utama dalam implementasi kebijakan sosial berbasis kolaborasi, khususnya di wilayah yang memiliki kesenjangan teknologi antarwarga.

Temuan menarik lainnya adalah besarnya pengaruh kualitas kepemimpinan lokal dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor. Dalam konteks Kecamatan Sako, keberadaan Camat yang aktif menjembatani koordinasi antarpihak terbukti mempercepat proses distribusi bantuan dan memperkecil potensi konflik kepentingan antar lembaga. Kepemimpinan yang komunikatif, responsif, dan terbuka terhadap kritik mendorong terciptanya ruang partisipasi yang lebih luas bagi komunitas lokal. Hal ini konsisten dengan temuan Holm (2018) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan informasi manajerial secara aktif oleh pemimpin lokal mampu memperbaiki kinerja organisasi yang sebelumnya rendah. Ini memperkuat posisi teori *facilitative leadership* dalam konteks pemerintahan lokal, di mana karakter pemimpin menjadi determinan penting dalam keberhasilan kebijakan berbasis kolaborasi. Bryson *et al.* (2015) juga menggarisbawahi bahwa kolaborasi lintas sektor membutuhkan pemimpin yang dapat mendesain proses interaksi secara strategis dan inklusif, terutama dalam konteks layanan publik. Dengan demikian, dimensi kepemimpinan tidak hanya relevan sebagai elemen pendukung, tetapi juga sebagai pengungkit keberhasilan program dalam kerangka *collaborative governance*.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *collaborative governance* dalam pelaksanaan program bantuan sosial di Kecamatan Sako Kota Palembang telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, tenaga kesejahteraan masyarakat, lembaga sosial, dan komunitas lokal. Kolaborasi ini dilakukan melalui mekanisme koordinasi, dialog tatap muka, pembagian peran, serta pengawasan bersama. Meskipun secara normatif struktur kolaborasi telah dibentuk, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat efektivitas pelaksanaan program, antara lain: keterbatasan sumber daya, ketidaktepatan data penerima manfaat, lemahnya forum komunikasi, serta ketidakseimbangan peran antaraktor.

Hasil penelitian ini memperkuat teori *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008), yang menekankan pentingnya trust building, dialog tatap muka, serta partisipasi inklusif untuk menghasilkan kerja sama yang efektif. Temuan lapangan menunjukkan bahwa meskipun kolaborasi telah berlangsung, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih rendah dan sistem digital belum sepenuhnya dioptimalkan. Di sisi lain, keberadaan kepemimpinan fasilitatif serta inisiatif dalam membangun forum komunikasi

menunjukkan potensi perbaikan ke depan, terutama dalam konteks penyaluran bantuan sosial yang adil dan transparan.

Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas bantuan sosial berbasis kolaborasi di masa mendatang, diperlukan penguatan kelembagaan, kejelasan peran dan insentif masing-masing aktor, serta strategi pemberdayaan yang lebih menyentuh akar permasalahan. Evaluasi dan pembaruan data secara berkala, peningkatan kapasitas SDM, serta pengembangan sistem digital yang inklusif dapat menjadi langkah penting dalam memperbaiki kualitas tata kelola kolaboratif di tingkat lokal, sehingga mampu menjawab tantangan kemiskinan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup wilayah yang hanya difokuskan di Kecamatan Sako Kota Palembang, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi secara luas. Selain itu, waktu pelaksanaan yang relatif singkat dan keterbatasan akses terhadap beberapa informan kunci juga dapat memengaruhi kedalaman data yang diperoleh.

Arah Masa Depan Penelitian: Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah ke kecamatan lain di Kota Palembang atau daerah dengan karakteristik sosial ekonomi yang berbeda, guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang praktik *collaborative governance* dalam penanggulangan kemiskinan. Selain itu, integrasi pendekatan kuantitatif dengan pengukuran indikator kinerja program serta persepsi masyarakat terhadap efektivitas bantuan sosial dapat memperkaya analisis. Fokus lanjutan juga dapat diarahkan pada peran teknologi digital dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi distribusi bantuan, serta kajian terhadap penguatan kapasitas kelembagaan lokal sebagai aktor utama dalam kolaborasi lintas sektor.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dinas Sosial Kota Palembang, Kecamatan Sako, serta seluruh informan yang telah memberikan dukungan, informasi, dan kerja sama selama proses penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan tata kelola bantuan sosial dan pengentasan kemiskinan di Kota Palembang.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Akib, I., & Risfaisal. (2016). Bantuan Langsung Tunai. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 4(1), 1–10. <https://www.neliti.com/publications/60945/bantuan-langsung-tunai#cite>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Badan Pusat Statistik Kota Palembang. (2024). *Profil kemiskinan di Kota Palembang Maret 2024*.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2015). Designing and implementing cross-sector collaborations: Needed and challenging. *Public Administration Review*. <https://doi.org/10.1111/puar.12432>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Fadilah, R. (2021). Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai. *Jurnal El-Thawalib*, 2(3), 167–179. <http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/thawalib/article/view/3992>

- Fatimatuzzuhro. (2022). Collaborative Governance pada Program Keluarga Harapan sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Magelang. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara*, (6)1: 195-207.
<https://jom.untidar.ac.id/index.php/jman/article/view/2490>
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Sumedang: IPDN.
- Handayani, N., Risyanti, R., Suropto, S., & Simangunsong, F. (2023). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13(1), 66–67.
<https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i1.3329>
- Holm, J. M. (2018). Successful problem solvers? Managerial performance information use to improve low organizational performance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(3), 303–320. <https://doi.org/10.1093/jopart/muy017>
- Hutagalung, J., Nofriansyah, D., & Syahdian, M. A. (2022). Penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 6(1), 198.
<https://doi.org/10.30865/mib.v6i1.3478>
- Jaya, A., Murahman, A., & Muslimin, A. (2023). Collaborative Governance dalam Penanggulanagn Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Desa*, 2(2): 114-121.
<http://www.ejurnal.unmura.org/index.php/masda/article/view/202>
- Kuncoro, A., & Handayani, R. (2015). Faktor Faktor Penyebab Kemiskinan. *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, Dan Kebudayaan*, 16(1), 1–30.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=g0ITS5kA AAAJ&sortby=title&citation_for_view=g0ITS5kAAAAJ:Y0pCki6q_DkC
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2018). *Modul Perkuliahan Metodologi Penelitian Sosial*. Sumedang: Fakultas Politik Pemerintahan IPDN.
- Scott, T. A., & Thomas, C. W. (2017). Winners and losers in the ecology of games: Network position, connectivity, and the benefits of collaborative governance regimes. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 27(4), 647–660.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mux009>
- Simangunsong, F. (2019). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yuliana (2023) *Collaborative Governance dalam Mengatasi Kemiskinan Menuju SDGs 2023 di Kota Makassar*. (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar).
https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/38565-Full_Text.pdf